

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur:

- A. Zainuri, *Akal Kultural Korupsi di Indonesia*, Depok: Cahaya Baru, 2007.
- Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.
- , *Pembelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- , *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2009.
- , *Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP-Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2007.
- Bhatara Ibnu Reza Junaidi, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Jakarta. Penerbit Imparsial, 2007.
- Buchari Said, *Sekilas Pandang Tentang Hukum Pidana Militer (Militair Strafrecht)*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2008.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, (Terjemahan Muttaqien Raisul)*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- HM Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015.

- IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Indria Samego, *Bila ABRI Berbisnis*, Jakarta: Mizan, 2000.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan penyidikan) Bagian Pertama, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1995
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2006.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- , *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 2004.
- Sayidiman Suryohadiprojo, *Suatu Pengantar dalam Ilmu Perang: Masalah Pertahanan Negara*, Jakarta: Intermasa, 1981.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012.
- SR Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1985.
- Sustandyo Wignyosubroto, *Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar Kearah Kajian Sosiologi Hukum*, Malang: Bayu Media Publishing, 2008.

Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Jurnal:

Eddy Rifai, *Perspektif Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Lampung. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 26 No.1, 2014.

Edward Febriyatri Kusuma, *Dihukum Seumur Hidup, Ini Modus Brigjen Teddy Korupsi Dana Alusista*, <https://news.detik.com/berita/3388384/dihukumseumur-hidup-ini-modus-brigjen-teddy-korupsi-danaalusista>, Kamis 05 Januari 2017, diunduh 20 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB.

Erdianto Efendi, *Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi Di atas Tanah Sengketa*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 1, di akses pada Tanggal 20 Oktober 2023 Pukul 10.30 WIB.

Eva Rosari Sitindaon, *Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum dan Sesudah Pengaturan Restoratif Justice di Indonesia*, Medan, Jurnal Ilmiah. Vol.1 No.1, 2012.

Poli R.K, Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Gratifikasi. *Lex Privatum*, 5(10), 2017. 19-26. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/18741>

Utami N. S. B., & Supriyadi, Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2), 2014. 100–107. Retrieved from <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11102>.

Website:

Beniharmoni Harefa, *KPK Tak Perlu Minta Maaf Kabasarnas Jadi Tersangka*,
<https://hukum.upnvj.ac.id/kpk-tak-perlu-minta-maaf-kabasarnas-jadi-tersangka/>, diakses Tanggal 10 Juli 2024

<http://repository.unpas.ac.id/36522/5/BAB%20III.pdf>, diunduh 20 Oktober 2023,
Pukul 10.00 WIB.

<https://antikorupsi.org/id/news/peradilan-koneksitaskasus-korupsi> diakses pada
Tanggal 20 Oktober 2023 pada pukul 09.00 WIB.

<https://indonesiana.tempo.co/read/107001/2017/01/18/emerson/peradilan-koneksitas-kasus-korupsi-emersonyuntho> diakses pada Tanggal 20 Oktober
2023 pada pukul 09.00 WIB.

Negara Amerika, Pelaintiff-Appellee, v. JamesWELLS,. Defendant- Appellee,
diakses melalui:)/1. next. westlaw.com/Search/Result.
html?query=responsibility, diakses pada tanggal 20 Oktober 2023 pukul
10.25 WIB.

Samuel James Jhonson, Pettitioner, *Supreme Court of the United States*, diakses
melalui:[http://1.next.westlaw.com/Document/15509aedelbeb
11e5a807ad48145ed9f1/view/fullText.html](http://1.next.westlaw.com/Document/15509aedelbeb11e5a807ad48145ed9f1/view/fullText.html) diakses pada Tanggal 20 Okt
2023, Pukul 09.00 WIB

Sekilas KPK, di unduh dari <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>
[Tanggal 20 Oktober 2023](http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk), pukul 9.29 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Peraturan Panglima TNI Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan Oditurat.